

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER

(Studi Kasus : Kecamatan Kaliwates)

Oleh

RIZKY HADIATULLAH

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah
Jember

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember” ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates dan Bagaimana efektifitas peran pelaksana di lapangan?

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwates dan Kementerian Agama Kabupaten Jember. Pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi, analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Penyuluhan hingga proses pemberian dana tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar terhadap masyarakat sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankannya. Dalam hal efektifitas pelaksana dilapangan sudah berjalan dengan baik karena pelaksana atau implementor sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada.

Kata kunci : *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.*

ABSTRACT

This study, entitled "Indonesia Smart Card Policy Implementation in the district of Jember Kaliwates" aims to know how the implementation policy of Indonesia Smart Cards in District Kaliwates and How effective implementation role in the field? The research method uses a qualitative approach. UPT data sources obtained from the District Education Office and the Ministry of Religious Kaliwates Jember. Collecting data through interviews, observation and documentation, analysis of data using the model of Miles and Huberman which includes data reduction, data presentation and conclusion. of the research results can be concluded that Indonesia Smart Card Policy Implementation in the district of Jember Kaliwates is going according to the applicable procedures. Extension to the funding of Indonesia Smart Card Policy on society has been done by the institutions that have been designated by the government to run it. In terms of the effectiveness of implementers in the field

are already well underway for the executor or implementer is already well underway in accordance with existing procedures.

Keywords : Indonesia Smart Card Policy Implementation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya sebuah kebijakan akan memiliki suatu tujuan yang bersifat meringankan suatu beban yang ditanggung oleh masyarakat dalam suatu negara atau wilayah yang pada dasarnya mencakup urusan ekonomi, pendidikan kesehatan bahkan kesejahteraan masyarakat yang terdapat didalamnya. Belakangan ini pemerintahan baru di era Joko Widodo memiliki suatu kebijakan atau gebrakan baru dalam dunia pendidikan masyarakat Indonesia, yang tentunya memiliki suatu tujuan untuk meningkatkan suatu standarisasi pendidikan di Indonesia.

Seperti halnya kota besar lainnya Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang bisa dikatakan sebuah Kabupaten dengan mayoritas penduduk terbesar ke-3 di Jawa Timur. Mayoritas masyarakat kabupaten Jember yang bisa dikatakan menengah kebawah sangat membutuhkan suatu perubahan yang dinilai mampu untuk dapat memberikan suatu perubahan kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakatnya khususnya dalam hal pendidikan masyarakat Kabupaten Jember bisa dikatakan masih rendah tingkat partisipasi yang menyangkut Pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hal ini dapat kita lihat dari tingkat partisipasi siswa dalam menuntut ilmu yang masih kurang, dan salah satu indikator tersebut dikarenakan tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan masih kurang karena alasan tuntutan ekonomi yang kurang sehingga banyak siswa di kabupaten Jember ini khususnya kecamatan Kaliwates yang

putus sekolah. Dengan kehadiran kebijakan kartu sakti khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dipemerintahan Jokowi ini diharapkan mampu untuk memberikan suatu solusi yang tepat bagi masyarakat Kabupaten Jember khususnya di wilayah penelitian penulis di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Kartu Indonesia Pintar merupakan salah satu kebijakan baru yang dikeluarkan di tahun 2014 dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres ini merupakan dasar hukum bagi Pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan menerbitkan kartu yang disebut-sebut sebagai "Kartu Sakti".

Kartu Indonesia Pintar diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah mulai dari 6-12 tahun dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat program Indonesia Pintar. Untuk tahap awal ini di tahun 2014 pemerintah telah mencetak sekitar 160.000 Kartu yang ditujukan untuk seluruh siswa yang membutuhkan di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Jember.

Perpres ini diterbitkan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program yang bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat, sehingga bisa mengurangi jumlah penduduk miskin serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya wilayah kabupaten Jember.

Salah satu bentuk untuk mengurangi penduduk miskin tersebut dilakukan pemberian bantuan berupa kartu yang memiliki kegunaan untuk dapat membantu

memberikan keringanan bagi masyarakat Kabupaten Jember yang setidaknya terdapat tiga program unggulan perlindungan sosial, pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program. Kartu identitas tersebut adalah kartu keluarga sejahtera untuk menerima program simpanan keluarga sejahtera, kartu Indonesia Pintar untuk penerima program Indonesia Pintar dan kartu Indonesia Sehat untuk penerima program Indonesia Sehat.

Dalam hal pendidikan ini, sangat diharapkan kartu yang memiliki fungsi dalam bidang pendidikan normatif mulai dari SD, SMP, dan SMA ini untuk dapat memberikan suatu perubahan Pendidikan yang lebih maju di Indonesia dan diharapkan pemerintah kabupaten jember khususnya dalam wilayah penelitian untuk mampu memberikan kontribusi pasti dalam hal pelaksanaan perpres ini yang tentunya untuk mensukseskan fungsi dari Kartu Indonesia Pintar itu sendiri, melihat antusiasme masyarakat jember yang berharap tinggi kepada suatu kebijakan yang dinilai bisa dapat memberikan suatu keringanan khususnya dalam bidang pendidikan anak anaknya yang berkelanjutan.

Guna mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pembentukan tim ini juga telah ditetapkan dalam perpres itu sendiri. Serta pendanaan bagi pelaksanaan program ini bersumber dari APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun terdapat kontra atas penerbitan perpres tersebut. Yakni perpres tersebut berlaku pada tanggal 10 November 2014, sedangkan peluncuran kartu sakti telah diluncurkan pada tanggal 3 November 2014. Peluncuran tersebut mengacu pada instruksi presiden (Inpres) No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan

Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga Produktif.

Penelitian ini sangat penting dan menarik karena peneliti menganggap bahwa suatu program yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah dalam Perpres No 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Namun dilain sisi jumlah penerima kartu sakti tersebut di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates ini yang diharapkan mampu untuk memberikan suatu perubahan mendasar masih belum efektif dan efisien karena masih kurangnya pemahaman fungsi dari kartu tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates?
2. Bagaimana efektifitas peran pelaksana di lapangan?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan kartu indonesia pintar di Kecamatan Kaliwates.
2. Untuk mengetahui seberapa efektifkah peran pelaksana di lapangan.

Hasil penelitian ini diharapkan untuk mampu memberikan kegunaan dalam:

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah kabupaten jember untuk lebih meningkatkan kontribusi dalam mensukseskan

- program yang ditetapkan oleh perpres.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan Kabupaten Jember khususnya Dinas Pendidikan dalam pengawasan serta peningkatan mutu pelayanan terhadap Masyarakat untuk penerimaan kartu sakti itu sendiri khususnya.
 3. Dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dalam topik atau permasalahan yang sama.

KAJIAN TEORI

Konsep Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah :

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2001:65)

Konsep implementasi muncul ke permukaan beberapa dekade yang lalu sejak Harold Laswell (1956) mengembangkan gagasannya bahwa untuk memahami kebijakan publik dapat digunakan suatu pendekatan proses dalam kebijakan. Menurutnya implementasi merupakan salah satu bagian dari beberapa tahapan yang harus dilalui dari keseluruhan proses perumusan kebijakan publik, formulasi, legitimasi dan evaluasi. (Harold Laswell (1956) dalam Emy Kholifah, 2016:13)

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan”.(Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab,2001:68)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau 45 keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

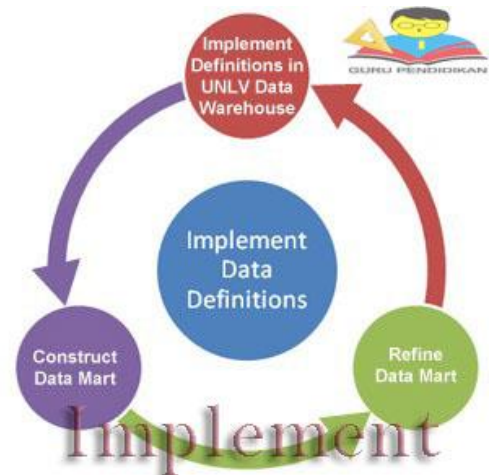
Selain itu Implementasi memiliki arti sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan. Jika dikaitkan dengan pemerintahan implementasi merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok, baik pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Solichin A. Wahab, 1990 :51). Implementasi kebijaksanaan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijakan-kebijaksanaan akan sekedar beryoa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan dengan baik.

“Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan -. Alternatif masih abstrak atau bersifat alternatif makro atau mikro-beton “(2006: 25).

Ada pula pengertian implementasi menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam

Birokrasi Pembangunan. “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” (Setiawan, 2004:39).

Daftar Gambar 2.1



Sumber : (Setiawan, 2004:39). Dalam buku yang berjudul **Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan**

Jika dilihat dari berbagai sudut pandang yang telah dijelaskan , maka suatu implemtasi kebijakan itu bisa dinilai sebagai suatu usaha yang diberikan oleh suatu pejabat atasan terhadap bawahan yang dimana bersifat suatu kebijakan yang mencakup dalam berbagai hal. Sebuah mekanisme yang bisa dikatakan mengalir dari atasan terhadap bawaha yang bersinergi akan menciptakan suatu pelayanan publik terhadap kebijakan yang telah diberikan dari pusat (atasan) terhadap daerah (bawahan).

Perhatian atau fokus utama dalam suatu implementasi adalah suatu arahan atau kebijakan yang dinilai dan dibuat dengan mencakup sasaran atau masalah yang bersifat global dan terpenting seperti sejauh mana kebijakan akan dibuat berkenaan dengan permasalahan yang dialami oleh

publik, dan sejauh mana tujuan dari kebijakan itu dibuat tepat sasaran atau tidak. Hal inilah yang sangat penting dalam peran daerah yang bisa dikatakan bawahan dalam menanggapi atau melaksanakan suatu kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Kegagalan suatu kebijaksanaan (*policy failure*) ini dapat dilihat atau dibagi menjadi dua kategori yaitu tidak diimplementasikan (*non implementation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*):

1. Tidak diimplementasikan (*non implementation*) mengandung pengertian bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, kemungkinan karena pihak-pihak yang terlibat atau terkait didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka tidak bekerja secara efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan yang ada tidak sanggup mereka tangani yang mengakibatkan suatu implementasi yang efektif dan sukar untuk dipenuhi.
2. Implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*) biasanya hal ini terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki, biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : pelaksanaannya yang jelek,

kebijaksanaannya sendiri memang jelek, atau kebijaksanaan tersebut memang bernasib jelek. (Solichin Abdul Wahab,2004:62).

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel, faktor dan dimensi dan masing-masing saling berhubungan satu sama lain. Para ahli banyak mengemukakan pendapatnya tentang teori metode implementasi kebijakan. Menurut Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu : isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan menyangkut :

1. Kepentingan kelompok sasaran
2. Jenis manfaat
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksanaan program

Sumber daya yang dilibatkan (AG. Subarsono, 90-94).Sedang variabel lingkungan implementasi menyangkut :

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. karakteristik lembaga dan penguasa.
3. kepatuhan dan daya tanggap.

Sedang George Edward III memandang bahwa : implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Mazmanian dan Sabatier mengembangkan model yang disebut sebagai kerangka analisis implementasi. Peran implementasi penting dari kebijaksanaan Negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan

formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yaitu :

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan cara cepat proses implementasi.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Dari berbagai pendapat tersebut, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Usaha untuk melakukan, melaksanakan kebijakan tertentu, tentunya membutuhkan suatu keahlian dan keterampilan dalam menguasai persoalan yang hendak dikerjakan. Dalam hal ini birokrasi menempati kedudukan yang strategis, karena birokrasi yang berkewajiban melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga birokrasi senantiasa dituntut untuk mempunyai keterampilan dan keahlian yang tinggi.

Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminto, 1990: 327). Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) *berarti to provide the means for carryingout*(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau

akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul Wahab,1997:67). Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan van hom (dalam Abdul Wahab 1997 : 65), menyatakan bahwa : Proses implementasi adalah “those achivemen by public or private individuals groups that are directed the achievement of objecteves set forth in prior decision” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahka pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan saran-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994 : 137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti berikut ini: sumber : Bambang Sunggono (1994 : 139). Dari skema diatas terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai “*policy*

performance". Secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat, misalnya. Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai "*policy outcome*" atau "*policy impact*".

Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Namun dibalik kerumitan dan kompleksitasnya tersebut, implementasi kebijakan memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-cataatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun waktu tertentu (Dunn, 200:58).

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Tipe Penelitian

Berdasarkan topik dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini membutuhkan pendekatan yang bersifat kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam penelitian yang

menggunakan pendekatan kualitatif, permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang tidak bisa dijelaskan dan dianalisa melalui data-data statistik sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya, yang bertujuan untuk menjangring informasi secara mendalam dari suatu fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan daerah atau tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh data-data yang nantinya diperlukan dalam penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwates Jember, dan tentunya di wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Penentuan Informan

Menurut Kriyantono (2008:163) "sampel pada penelitian kualitatif adalah informan atau subjek riset, yakni orang-orang yang dipilih diwawancarai atau diobservasi sesuai tujuan riset". Informan yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian memiliki karakteristik yang menunjang terlaksananya penelitian. Menurut Moleong (2010:132) karakteristik dari informan ini adalah "harus jujur, taat pada perjanjian, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian, serta mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi". Subjek penelitian yang akan menjadi informan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja atau dengan kata lain teknik penentuan informan dengan metode *purposive* (bertujuan) yang dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian tersebut.

Maka dari itu dalam penelitian deskriptif kualitatif, peneliti dalam penelitian ini memilih beberapa informan yang telah memenuhi kriteria yang telah di sebutkan sebelumnya dalam metode penelitian purposive sampling.

Sumber Data

Data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Sebab, dengan data akan mempermudah untuk menganalisis suatu masalah. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini juga membutuhkan suatu informasi atau data yang sebelumnya telah diambil dari beberapa informan yang dianggap telah memenuhi kriteria yakni :

1. Kabid Humas Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
2. Kabid UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwates.
3. Kementrian Agama Urusan Pendidikan Kabupaten Jember.
4. Kepala sekolah SD,SMP,SMA / MI
5. Masyarakat penerima KIP

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

Analisis Data

Bogdan dan Biklen (dalam Mukhtar dan Widodo, 2000:123) mendefinisikan analisa data sebagai berikut.

“Analisa data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena)

dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain.” (Bogdan dan Biklen (dalam Mukhtar dan Widodo, 2000:123))

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992).

Pemeriksaan Keabsahan (Verifikasi) Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahian (*validitas*) dan keandalan (*reability*) menurut versi positifisme dan sesuai dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Teknik pemeriksaan keabsahan data menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam penelitian dengan data dan analisis kualitatif. Hal ini dikarenakan adanya keraguan dan kemungkinan terjadinya distorsi atas sebuah informasi, data maupun hasil analisis data penelitian. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memandang perlu untuk melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini. Berdasarkan pendapat Moleong (2010:327-338), teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

Penelitian ini juga melakukan pendalaman pada fenomena dilapangan sehingga peneliti mampu memberikan suatu data yang benar- benar nyata dilapangan, untuk itu dalam penelitian ini peneliti juga ikut serta terjun langsung ke lapangan guna mengetahui sebuah realitas yang terdapat dilapangan (masyarakat) dan juga terdapat pada lokasi penelitian lainnya (Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwates).

- a. Perpanjangan Keikutsertaan
- b. Ketekunan/Keajegan Pengamatan

- c. Triangulasi
- d. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi
- e. Analisis Kasus Negatif
- f. Pengecekan Anggota
- g. Uraian Rinci
- h. Auditing

Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, definisi ini disebut juga definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu. Definisi ini disebut juga definisi subjektif karena disusun berdasarkan keinginan orang yang akan melakukan pekerjaan. Yang merupakan ciri-ciri definisi operasional ialah mengacu pada target pekerjaan yang dicapai, berisi pembatasan konsep, tempat, dan waktu, dan bersifat aksi, tindakan, atau pelaksanaan suatu kegiatan.

Definisi operasional adalah berfungsi untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel diamati atau diteliti. Definisi operasional juga berfungsi untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengambilan instrument atau alat ukur (Notoadmodjo, 2010)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Kecamatan Kaliwates merupakan salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Pembentukan wilayah kecamatan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah - wilayah Kabupate DATI II. Sesuai

ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa batas wilayah Kecamatan Kaliwates sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sukorambi
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Ajung
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Sumber Sari
- d. Sebelah barat : Kecamatan Rambli

Berdasarkan data statistic, luas wilayah Kecamatan Kaliwates adalah kurang lebih 215 HA, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Mangli, Kelurahan Sempusari, Kelurahan Kaliwates, Kelurahan Tegal Besar, Kelurahan Jember Kidul, Kelurahan Kepatihan, Kelurahan Kebon Agung.

Kecamatan kaliwates merupakan sebuah kecamatan yang memiliki daerah ketinggian yang bisa dikatakan cukup tinggi yakni sekitar 98 m dan berbeda dengan daerah/kecamatan lainnya. Hal itu mempengaruhi tingkat kesuburan tanah yang bisa dikatakan tanah didaerah kecamatan kaliwates memiliki presentase tanah kering (tidak subur) dan tanah subur sekitar 30:70 terhadap luas keseluruhan. Dengan kondisi demikian masyarakat kecamatan Kaliwates lebih memilih menjadi karyawan baik itu karyawan swasta maupun Negeri, buruh sebagai pekerjaannya.

Wilayah penelitian merupakan gal yang diperlukan untk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut.

Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan maka sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih. Adapun

hasil penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau lebih yang kemudian dalam akan menimbulkan suatu pokok pikiran guna terselesainya sebuah tujuan yang hendak dicapai sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dalam hal ini komunikasi sangat penting dilakukan oleh lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga yang terkait guna tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam hal pengimplementasian sebuah kebijakan kartu indonesia pintar diwilayah kecamatan kaliwates setiap komunikasi yang dilakukan diharapkan untuk tidak terdapat sebuah *mis communication* atau komunikasi yang terhambat, menurut informan Kepala Upt. Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwates Bpk. Siswotanojo menyatakan bahwa.

“Proses komunikasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan kebijakan KIP dinilai cukup baik, hal ini tergambar dari hubungan antara pusat dan daerah tentunya Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah memberikan suatu arahan kepada UPT dinas pendidikan yang terdapat dikabupaten Jember mengenai, proses maupun syarat mendapatkan KIP itu sendiri yang kemudian dari pihak UPT dinas pendidikan memberikan sebuah informasi kepada seluruh masyarakat tentunya siswa dari sekolah-sekolah yang terdapat dalam wilayah kecamatan tentunya Kecamatan Kaliwates.”(Wawancara dengan Bpk.Siswotanojo, 23 Mei 2016).

Selain itu menurut Bidang Pendidikan Pementrian Agama Kabupaten Jember Bpk. Nasri menyatakan bahwa.

“KIP merupakan sebuah kebijakan baru yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh presiden, jadi kebijakan ini tidak main-main menyangkut Pendidikan. Pada dasarnya kami sendiri membawahi seluruh madrasah yang terdapat di kabupaten, mengenai informasi KIP ini sudah kami informasikan sesuai prosedur yang telah tertulis sebelumnya kepada seluruh siswa-siswi madrasah yang terdapat di kabupaten jember, yang diharapkan agar KIP dapat menunjang tingkat Pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya”. (Wawancara dengan Bpk. Nasri 24 Mei 2016).

Dari proses komunikasi yang telah dilakukan oleh pusat dan daerah tentunya sangat diharapkan untuk mampu sampai kepada sasaran kebijakan yaitu masyarakat. Seperti halnya menurut informan masyarakat ibu Indri menyebutkan “ Iya, saya tahu mengenai KIP itu sendiri mas, tapi sejauh ini saya masih belum seberapa tahu tentang cara mendapatkan KIP itu sendiri, dan saya berharap pemerintah seharusnya bisa memberikan sebuah informasi yang pas mengenai KIP mas. Hal ini juga dinyatakan oleh informan masyarakat Bpk. Handoko “Iya mas anak saya sekolah di madrasah dan sekolah negeri tapi mengenai KIP yang katanya bisa meringankan saya belum bisa mendapatkannya, karena informasi yang saya dapatkan kurang bagaimana cara untuk dapetnya sedangkan kata anak saya beberapa temannya sudah mendapatkannya”

Menurut Humas UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwates Bpk. Hamak

“Dari pihak UPT sudah memberitahukan kepada masyarakat tentunya kepada siswa – siswa

sekolah yang terdapat di kecamatan kaliwates ini mengenai KIP baik mengenai cara hingga syarat-syaratnya baik melalui Lisan yang kami berikan maupun dari web yang telah tersedia”. (Wawancara dengan Bpk. Hamak, 23 Mei 2016)

Dari informasi yang telah didapat melalui beberapa informan dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh lembaga yang terkait kepada masyarakat masih kurang berjalan dengan baik, masih ada kendala – kendala yang menghambat untuk tercapainya sebuah kebijakan.

Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh sebuah implementor atau penerap kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan sebuah kebijakan dengan baik, seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, dan apabila implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dalam penelitian ini disposisi sangat berpengaruh dan harus berjalan dengan baik antara implementor dan pembuat kebijakan agar kebijakan tersebut berjalan sesuai keinginan. Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan sebuah kebijakan baru yang telah dibuat dan diputuskan oleh Inpres Nomor 7 Tahun 2014 dan mulai diundangkan oleh Permendikbud No.12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar dan dalam hal ini seluruh komponen lembaga yang tergabung diwajibkan untuk menjalankan sesuai undang – undang yang berlaku.

Menurut informan Bpk Siswotanojo menyebutkan bahwa.

”KIP sebelumnya itu telah disahkan atau diundangkan oleh Kemendikbud, yang didalamnya terdapat juga lembaga-lembaga pendidikan yang terkait mas, jadi saya pikir dalam melakukan sebuah tindakan atau tugas kami disini dibawah kewenangan Kemendikbud dan tentunya harus sesuai apa yang telah diinginkan oleh kebijakan dari kemendikbud tersebut, makanya kami disini tidak main – main karena kebijakan ini haruslah tepat sasaran sesuai apa yang telah disebutkan dalam undang-undangnya” (Wawancara dengan Bpk Siswotanojo, 23 Mei 2016)

Selain itu menurut Bpk Nasri bidang Pendidikan Kementerian Urusan Agama Kabupaten Jember menyatakan.

”Dari pusat sudah kami terima dan kami jalankan di sekolah-sekolah dibawah naungan Kementrian Agama, untuk disposisi sendiri menurut saya tidak ada kendala yang besar atau kendala-kendala yang dapat menghambatnya mas,sejauh ini baik-baik saja apa yang diharapkan pemerintah sudah kami jalankan tentunya dibawah kewenangan kami selaku Kementrian Agama”. (Wawancara dengan Bpk. Nasri, 24 Mei 2016)

Dari informasi yang telah diterima memang benar bahwa sebuah disposisi antara watak atau karakteristik setiap lembaga yang terdapat didalam sebuah kebijakan harus benar – benar sejalan dan seimbang antara implementor dan pembuat kebijakan. Hal inilah yang biasanya mengakibatkan suatu pengimplementasian kebijakan berjalan tidak sesuai harapan atau yang diinginkan. Sejauh ini disposisi yang terdapat dalam penelitian ini memang telah

berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Namun dalam hal ini pemerintah atau pembuat kebijakan sebaiknya harus sering mengevaluasi atau turun tangan langsung terhadap kinerja lembaga-lembaga yang telah mengimplementasikan sebuah kebijakan yang dibuat, agar tidak adanya suatu masalah yang dapat menghambat kebijakan tersebut.

Sumber Daya

Walaupun sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan dan telah dikomunikasikan secara jelas serta konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif, tanpa sumberdaya, kebijakan tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Informan Bapak Siswotanojo menyatakan.

“Untuk sumberdaya, nah ini mas yang kebanyakan menjadi kendala, disini saya menjelaskan bahwa untuk sumberdaya itu ada 2 menurut saya yakni sumberdaya manusianya dan sumber daya financial, untuk sumberdaya manusia kami yakin tidak ada kendala, ketika turun sebuah kebijakan atau tugas dari pusat otomatis langsung kami kerjakan atau implementasikan sesuai SOPnya, namun untuk sumber daya financialnya yang kebanyakan banyak dieluh-eluhkan, kurangnya perhatian pemerintah sehingga financial yang kami gunakan juga pas-pasan seperti untuk pemasangan brosur, baner, ATK dll masih kurang”. (Wawancara dengan Bpk. Siswotanojo 27 Mei 2016)

Dalam sebuah kebijakan sumber daya merupakan suatu hal yang sangat penting karena dalam penelitian ini sumber daya tidak hanya diartikan sebagai sumber daya alam saja, melainkan sumber daya manusia (SDM) dan sumberdaya financial. Yang dimana dalam sumberdaya tersebut sangatlah berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Bidang Pendidikan Kementerian Agama Bpk. Nasri menyatakan bahwa.

“Sumber daya jika didalam sebuah kebijakan yang bersifat tidak Nampak atau ulasan seperti kebijakan KIP ini bisa dikatakan tidak dilihat dari SDAny mas tapi yang menonjol yaitu sumber daya Financialnya atau pendaannya serta fasilitas yang diberikan oleh pembuat kebijakan. Benar kita sudah mendapatkan atau menerima suatu kebijakan dari pusat, tapi dananya tidakada, apabisaberjalan? Tidakmungkinan?. Yatapi untuk sejauh ini yang saya lihat dilapangan atau saya lihat realnya sumber daya financial dari pusat itu masih ada dan cukuplah walaupun terkadang yang kita terima masih kurang. Serta fasilitas yang diberikan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan itu masih bisa dikatakan kurang memadai. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga – lembaga dibawahnya yang langsung turun kelapangan”. (Wawancara dengan Bpk. Nasri, 30 Mei 2016)

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun

tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompetendankapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. Selain itu fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staff yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (saranadanprasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Menurut Ikhwan, Anggota Bidang Pendidikan Kementerian Agama mengatakan.

“Untuk fasilitas, atau sarana dan prasarana dilapangan itu masih kurang mas, dapat dilihat dalam wilayah per kecamatan ada madrasah didalamnya yang dibawah naungan kementerian agama tapi untuk anggota lapangan yang mengurus dilapangan itu masih kekurangan fasilitas sarana dan prasana yang mendukung kinerja anggota-anggota dalam memberikan pelayanan yang cukup”. (Wawancara dengan Bpk. Ikhwan, 30 Mei 2016).

Oleh sebab itu dari hasil wawancara yang telah diambil dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan tidak akan berjalan jika tidak diimbangi dengan sumberdaya – sumberdaya yang mumpuni. Dan sumberdaya disini tidak berarti sumber daya alamnya saja namun sumber daya manusia dan sumber daya fisik dan financial haruslah berjalan simbang, agar tercapainya suatu tujuan dari kebijakan, tentunya kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara

keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Menurut informan bpk. Siswotanojo mengatakan.

“Struktur birokrasi, menurut saya dalam hal struktur birokrasi dalam sebuah kebijakan itu harus jelas dan berjalan sesuai dengan keputusan atau kebijakan yang hendak ingin dicapai mas, tentunya dalam kebijakan ini Kartu Indonesia Pintar saya bisa mengatakan terdapat 2 komponen struktur birokrasi yakni dari pusat dan dari implementor, dari pusat telah menentukan siapa yang terlibat dalam sebuah keputusan, dan dari implementor sendiri itu juga terdapat struktur birokrasi yang mengikat guna mendukung berjalannya kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan”. (Wawancara dengan Bpk Siswotanojo, 31 Mei 2016).

Bidang Pendidikan Kementerian Agama Bpk. Nasri menyatakan bahwa.

“Sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik dan sesuai yang dituju, atau diinginkan juga tergantung dengan struktur birokrasi yang baik didalamnya, untuk hal ini menurut saya dalam konteks KIP struktur

birokrasi didalamnya sudah cukup baik seperti halnya pemerintah membuat kebijakan KIP saya rasa tepat dalam memilih siapa saja unsur birokrasi didalamnya, dan birokrasi yang menjalankan kebijakan tersebut juga tidak main-main dalam menyusun struktur birokrasi didalamnya, intinya tiaptiap tugas sudah ada yang menjalankannya”. (Wawancara dengan Bpk. Nasri, 30 Mei 2016).

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang utama dalam tercapainya sebuah kebijakan yang didalamnya berisi tentang pelaku atau aktor utama dalam pengimplementasian sebuah kebijakan dilapangan. Oleh sebab itu sebuah kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan apabila pembuat kebijakan maupun implementor salah dalam merumuskan atau menyusun sebuah struktur yang tepat.

Suatu kebijakan akan berjalan apabila ke empat komponen diatas terpenuhi hal ini dapat dinilai dari perencanaan sebuah kebijakan yang matang hingga pengimplementasiannya dilapangan. Menurut informan Bpk Siswotanoyo mengatakan.

“KIP di kecamatan Kaliwates ini menurut saya berjalan sesuai apa yang direncanakan pemerintah, hal ini juga tidak lepas dari upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia, ya mulai dari perumusan permasalahannya, sasarannya,tujuan hingga penanggulangannya itu sudah dipikirkan oleh pemerintah jauh sebelumnya”. (Wawancara dengan Bpk. Siswotanoyo, 16 Juni 2016).

Dalam hal pengimplementasian Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di lapangan dapat disimpulkan bahwa Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates tentunya telah di jalankan oleh implementor mulai dari proses komunikasi yang dilakukan antara implementor dengan pembuat kebijakan maupun implementor dengan fokus kebijakan yang telah dibuat yakni masyarakat penerima KIP. Dalam pengimplementasiannya implementor disini telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prosedur atau SOP yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan, hal ini dilakukan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai sasaran yang hendak dituju. Informan Bpk Siswotanoyo mengatakan.

“untuk proses pengimplementasian dari KIP itu memang telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dari prosedur tersebut sebelumnya kami telah pahami bahwa, tujuan pemerintah membuat kebijakan ini adalah untuk meningkatkan mutu dan standard pendidikan di Indonesia, tentunya juga pemerintah ingin meringankan beban masyarakat Indonesia, untuk itu dalam pengimplementasiannya kami selaku Implementor tidak hanya sekedar melakukan atau melaksanakan saja, namun kami telah berpegang teguh dengan standard operasional atau SOP yang telah ditentukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakannya”.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengimplementasian Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, dan untuk implementor atau pihak yang menjalankannya memang sudah melakukan sesuai dengan apa yang harus dilakukan

dilapangan, dan tentunya implementor melakukan sebuah pengimplementasian yang didasari oleh standar operasional atau SOP yang telah dibuat oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang diharapkan

Efektivitas Peran Pelaksana Dilapangan

Dalam sebuah kebijakan, dapat dikatakan efektif apabila implementor telah melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah itu sendiri, guna tercapainya suatu tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu dalam pengimplementasian KIP ini efektivitas peran pelaksana harus berjalan sesuai dengan SOP yang ditentukan dan dibuat oleh pemerintah. Untuk itu dalam hal ini efektivitas peran pelaksana dilapangan bisa dilihat dari.

Proses penyuluhan

Dalam hal ini sebuah proses dibutuhkan untuk mewujudkan suatu implementasi dari sebuah kebijakan Kartu Indonesia Pintar, salah satunya proses penyuluhan, proses penyuluhan merupakan proses dimana sebuah kebijakan itu diimplementasikan atau dijalankan oleh implementor terhadap sasaran kebijakan, dalam Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini sebuah proses penyuluhan haruslah memang benar-benar dilakukan oleh implementor itu sendiri. Menurut Bpk Siswotanojo Kepala Bidang UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwates mengatakan.

“Untuk proses penyuluhan kepada masyarakat mengenai Kartu Indonesia Pintar ini memang sudah kami lakukan, kebijakan ini memfokuskan kepada masyarakat yang tidak mampu, dan semua telah kami lakukan dengan upaya mensosialisasikan di sekolah – sekolah dan sebagian dari tim kami memang turun langsung kepada masyarakat untuk

mensosialisasikannya”.

(Wawancara dengan Bpk. Siswotanojo 22 Juni 2016)

Sementara menurut Bpk. Hamak Humas UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwates menyebutkan “Proses penyuluhan atau sosialisasi telah kita lakukan di sekolah-sekolah yang terapat di wilayah kecamatan Kaliwates ini,beberapa juga pernah dilakukan di lingkungan masyarakat kecamatan kaliwates” (wawancara dengan Bpk. Hamak, 22 Juni 2016) dan menurut Ibu Sadikin masyarakat Kecamatan Kaliwates mengatakan “ iya mas memang benar dari pemerintah sendiri telah melakukan sosialisasi mengenai KIP itu disekolah-sekolah anak saya, dan saya tau itu dari anak saya sendiri yang kemudian saya cepatcepat buat mengurusinya”. (Wawancara dengan ibu Sadikin, 28 Juni 2016).

Semua proses dalam kebijakan memang seharusnya dilakukan oleh implementor, hal ini dilakukan agar masyarakat atau sasaran dari sebuah kebijakan mengetahui tentang mengapa, bagaimana dan untuk apa kebijakan itu dibuat.

Proses Penentuan Siapa yang Dapat Menerima KIP

Penerima atau sasaran suatu kebijakan dalam kebijakan ini sebelumnya telah ditentukan dalam Permendikbud No.12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar, hal ini juga dijelaskan oleh Bpk. Siswotanojo.

“Masyarakat semuanya itu berhak mendapatkan KIP, namun dalam kebijakan ini kami masih berpegang terhadap UU yang mengatur tentang kebijakan ini, yang berfokus terhadap masyarakat yg tidak mampu”. (Wawancara dengan Bpk. Siswotanojo, 23 Juni 2016)

Dalam penentuan setiap kebijakan memang seharusnya pembuat kebijakan tersebut melakukan pemantauan atau observasi terlebih dahulu, agar suatu kebijakan tepat sasaran terhadap suatu permasalahan yang sedang dialami dalam hal ini tentunya masyarakat itu sendiri. Menurut Bapak Nasri Kepala Bidang Pendidikan Kementerian Agama menyebutkan.

“Suatu kebijakan itu tentunya harus melihat apa yang sedang terjadi di masyarakat, seperti halnya KIP ini sendiri mas, pemerintah tentu telah melakukan suatu observasi atau pemantauan terlebih dahulu, tidak asal membuat kebijakan, ya untuk KIP ini sendiri, pemerintah lebih memfokuskan masyarakat kurang mampu tentunya juga guna menunjang tingkat pendidikan di Indonesia”. (Wawancara 16 Juni 2015).

Sedangkan menurut bapak Sriyadi, masyarakat penerima KIP menjelaskan “Saya telah menerima KIP baru ini mas, memang benar dalam mendapatkannya itu pemerintah tidak sembarangan memberi KIP itu, karena sebelum mendapatkannya itu, kalau dinilai dari keluarga yang menengah keataslah itu tidak akan diberi”. (Wawancara tgl 25 Juni 2016)

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Nurul masyarakat yang tidak menerima KIP “ Saya tidak menerima KIP, sebab dari info yang saya ketahui memang KIP itu dikhususkan untuk orang yang memang benar-benar tidak mampu mas, saya pernah mencoba untuk mengajukannya namun sampai sekarang belum mendapatkannya”. (Wawancara dengan Ibu Nurul, 25 Juni 2016)

Suatu kebijakan dinilai efektif apabila kebijakan tersebut memang benar-benar tepat kepada sasaran, maka dari itu kebijakan KIP ini bisa dinilai sudah tepat sasaran terhadap masyarakat yang memang benar – benar membutuhkannya. Untuk itu

pemerintah harus lebih meningkatkan produktifitasnya dalam membuat suatu kebijakan tentunya kebijakan yang sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Proses Pemberian Bantuan Dana Kartu Indonesia Pintar

Dalam hal membuat kebijakan Kartu Indonesia Pintar tentunya pemerintah harus benar – benar matang terhadap segala isi kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan, hal ini dilakukan agar sasaran atau masyarakat tidak bingung dalam menerima sebuah kebijakan tersebut. Menurut Bpk Siswotanojo Kepala Bagian UPT dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwates menuturkan bahwa.

“Dalam proses pemberian bantuan dana itu sudah jelas mulai dari puncak akan turun kebawah ya mulai dari observasi pemerintah, untuk apa sih kebijakan itu dibuat? Untuk sapa? Apa gunanya? Itu sudah jauh jauh hari pemerintah telah menggodoknya secara matang, yang kemudian dari observasi tersebut dibuatlah undang-undangnya dan disahkan, kemudian UU tersebut akan turun kepada Implementor atau pihak yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya ya seperti dinas pendidikan ini kemudian, dari Dinas pendidikan mulai melaksanakannya seperti apa isi kebijakan tersebut mulai dari sapa targetnya hingga bagaimana prosesnya akan diberitahukan ke masyarakat, sedangkan untuk dana sendiri itu berupa uang yang akan diberikan kepada penerima KIP yang kemudian dicairkan melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah ” (wawancara tgl 23 Juni 2016).

Proses monitoring pemberian dan evaluasi bantuan

Proses monitoring atau pengawasan merupakan sebuah proses dimana implementor maupun pemerintah melakukan sebuah pengawasan terhadap kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan. Dalam hal ini

implementorlah yang harus bekerja extra guna tercapainya suatu tujuan kebijakan tersebut dibuat. Menurut Bpk Hamak selaku humas UPT dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwates menjelaskan “dari proses pengawasan kami memang tidak main-main mas, sebab setiap kebijakan yang telah dijalankan harus diawasi bagaimana jalannya dilapangan, sesuai apa tidak? Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan”. (Wawancara 23 Juni 2016). Sementara itu menurut Bapak Siswotanooyo menyebutkan bahwa.

“Proses ini tidak main-main mas, karena demi tercapainya sebuah tujuan kebijakan KIP ini, proses pengawasan telah dilakukan oleh kami terhadap berjalannya kebijakan tersebut, itu sudah kami bentuk tim tersendiri untuk melakukannya, proses ini kami lakukan mulai dari implementasinya hingga akhir tetap kami lakukan pengawasan, ya tentunya supaya tercapainya tujuan kebijakan KIP ini mas” (Wawancara 23 Juni 2016).

Kebijakan KIP merupakan sebuah kebijakan baru yang telah dibuat pemerintah guna meringankan beban masyarakat akan besarnya biaya pendidikan dan guna memajukan pendidikan di Indonesia. Wawancara dengan ibu sri rahayu, masyarakat kecamatan kaliwates menyebutkan “iya mas, saya tahu tentang KIP itu menurut saya KIP sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, tapi kadang kadang ada juga yang udah dapat KIP tapi keadaan keadaan ekonominya menengah keatas lah “. (Wawancara 24 Juni 2016)

Kurangnya pengawasan dari pemerintah dan implementor dapat menjadi faktor dan kendala utama dalam pengimplementasian kebijakan KIP.

Menurut Bpk Siswotanooyo mengatakan bahwa.

“Semua kinerja atau pelayanan yang telah diberikan masyarakat telah sesuai dengan SOP yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, mulai dari cara mendapatkan KIP itu sendiri hingga bagaimana masyarakat menggunkan dan mencairkan KIP itu mas, jadi saya rasa kami telah bekerja keras dan sungguh sungguh dalam menjalankan kebijakan tersebut”. (Wawancara 23 Juni 2016)

Dalam penelitian yang saya lakukan antusias masyarakat dalam menanggapi kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini bisa dikatakan cukup besar, namun dalam hal pelayanan agar mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ini, masih banyak masyarakat yang mengeluh – eluhkaanya. Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kaliwates Bpk. Asmari “KIP itu bagus mas, salah satu upaya dari pemerintah, tapi ya jangan terlalu ruwetlah untuk dapetinnnya, ya kita masyarakat susah masa’ mau dibikin susah dan ruwet lagi buat dapetinnnya” (Wawancara 27 Juni 2016). Dan menurut Ibu Kepala SMP 1 Jember mengatakan bahwa.

“KIP merupakan kebijakan yang sangat bagus menurut saya dan telah berjalan disekolah ini, cara mendapatkan KIP sendiri itu tidaklah sulit mas, hal ini bisa dilihat dari jumlah seluruh siswa yang mendapatkan KIP di Sekolah ini yang cukup banyak, untuk itu kepada seluruh masyarakat atau murid yang telah mendapatkannya saya harap untuk tidak menyalahgunakan dana tersebut dan lebih giat belajar tentunya”. (Wawancara 30 Juni 2016)

Dari beberapa proses yang dilakukan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas peran pelaksana dilapangan memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah namun masih terdapat kendala-kendala yang masih terjadi sehingga dapat mengurangi tingkat efektivitas peran pelaksana dilapangan. Untuk itu diharapkan pemerintah atau pembuat kebijakan untuk meningkatkan evaluasi kinerja terhadap implementor atau pelaksana dilapangan guna untuk dapat meningkatkan keefektifan peran pelaksana dilapangan itu sendiri. Mulai dari proses penyuluhan hingga proses evaluasi dan monitoring yang telah dilakukan atau dijalankan oleh implementor.

PENUTUP

Kesimpulan

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan sebuah upaya pemerintah guna mendukung dan meningkatkan suatu pendidikan di Indonesia khususnya kebijakan ini dibuat untuk masyarakat yang dinilai kurang mampu. Suatu kebijakan bisa dikatakan berjalan atau tepat apabila kebijakan tersebut di implemntasikan atau dilaksanakan oleh implementor atau pelaksana yang memiliki memang memiliki keahlian dalam bidangnya.

Dari hasil peneitian mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Proses Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah dilaksanakan Oleh lembaga pendidikan terkait khususnya terhadap masyarakat kecamatan kaliwates. Dalam pengimplementasiannya kebijakan ini memang sudah dijalankan oleh implementor atau pelaksana dilapangan sesuai dengan isi dari Kebijakan KIP itu sendiri mulai dari

1. Proses penyuluhan Kebijakan KIP kepada masyarakat

terutama siswa – siswa mulai dari SD hingga SMA.

2. Proses Mendapatkan KIP.
3. Proses Penentuan masyarakat yang berhak menerima KIP.
4. Proses Monitoring hingga proses evaluasinya.

Dari pengimplementasiannya dilapangan tentunya implementor atau pelaksana kebijakan harus sesuai dengan standard operasional atau SOP yang telah diberikan oleh pemerintah guna tercapainya tujuan tanpa ada kendala-kendala yang dapat menghambat berjalannya kebijakan tersebut.

Sebuah kebijakan bisa dikatakan berjalan apabila sebuah kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk itu tingkat efektivitas peran kerja implementor harus sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah dan tentunya oleh masyarakat. Dan dapat diketahui bahwa efektivitas peran pelaksana dilapangan dalam pengimplementasiannya di Kecamatan Kaliwates sudah berjalan dengan baik namun nyatanya dalam hal pengimplementasiannya dilapangan masih kurang dengan diindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang terkadang merasa kesulitan untuk mendapatkan KIP, hal ini tentunya menjadi koreksi tersendiri kepada implementor lembaga yang menjalankan sebuah kebijakan tersebut. Dapat diketahui beberapa manfaat pentingnya suatu proses dalam implementasi kebijakan yang dijalankan dilapangan antara lain:

1. Mengetahui tingkat efektifitas implementor dalam menjalankan suatu program atau kebijakan.
2. Mengetahui langsung apa kondisi masyarakat
3. Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur lembaga yang lebih

informative dalam menjalankan sebuah kebijakan

4. Sebagai wujud riil sebuah implementasi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Manfaat yang diperoleh sebenarnya tidak terbatas pada 4 hal diatas karena masih banyak hal positif lainnya.

Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas penulis memerikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan proses sosialisasi pemerintah khususnya lembaga atau implementor terkait dengan masyarakat dalam proses

pengimplementasian Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

2. Perlunya meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan baik antara pemerintah dalam artian pembuat kebijakan KIP dengan implementor atau lembaga yang menjalankan kebijakan KIP tersebut.
3. Pemerintah serta lembaga terkait seharusnya dapat lebih menampung aspirasi masyarakat.
4. Perlunya pemerintah meningkatkan efektifitas kerja guna mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.

Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Abdul Wahab, Solichin, 1997. *Evaluasi kebijakan Publik*. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang

A.G. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 90-94.

Aritonang, R. Lerbin, R. (2007). *Teori dan Praktik Riset Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia

Bambang Sunggono, 1994, *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Universitas Airlangga.

Charles O. Jones Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. Efektivitas Organisasi Jakarta: Erlangga**
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. Efektivitas Organisasi Jakarta: Erlangga**
- Hoogerwerf , Sjahrir, 1988, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.**
- Kurniawan, Agung. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: PEMBARUAN.**
- Koentjaraningrat. 1991. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta :Universitas Indonesia (UI-Press)**
- Kriyantono, Rachmat. 2008. Teknik Praktis Riset Komunikasi:Disertai Contoh Praktis Riset Media, PublicRelations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group**
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya**
- Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. RemajaRosdakarya**
- Mukhtar Widodo, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Ayyrrouz, Yogyakarta, 2000.**
- Notoatmodjo, Soekijo. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Penerbit PT. RinekaCipta. Jakarta**
- Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990**
- Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.**
- S. P. Siagian (1978:77) Terori Motivasi dan Aplikasinya, Jakarta: Bina Aksara**
- Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.**
- Sugiyono. (2005) Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABET**
- Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: BumiAksara.**

Perpres No 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Permendikbud No.12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar,

<http://www.sekolahdasar.net/2015/02/inilah-cara-mendapatkan-kartu-indonesia-pintar.html#ixzz4AMO24kH9>